

A. Latar Belakang

Untuk merealisasikan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri serta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional Pemerintah Daerah dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem pendekatan yang lebih demokratis serta memperhatikan keanekaragaman daerah, maka diperlukan langkah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, akan membawa konsekwensi logis terhadap Pemerintah Daerah, yaitu meningkatnya volume kegiatan dan beban kerja serta adanya perubahan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang tidak hanya menuntut peningkatan kemampuan keuangan daerah tetapi juga menuntut ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas tinggi. Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka terciptanya *Good Governance*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan dilatarbelakangi atas peraturan hukum diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan;
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) pelaksanaan administrasi Dinas.

Susunan Organisasi Dinas PMD

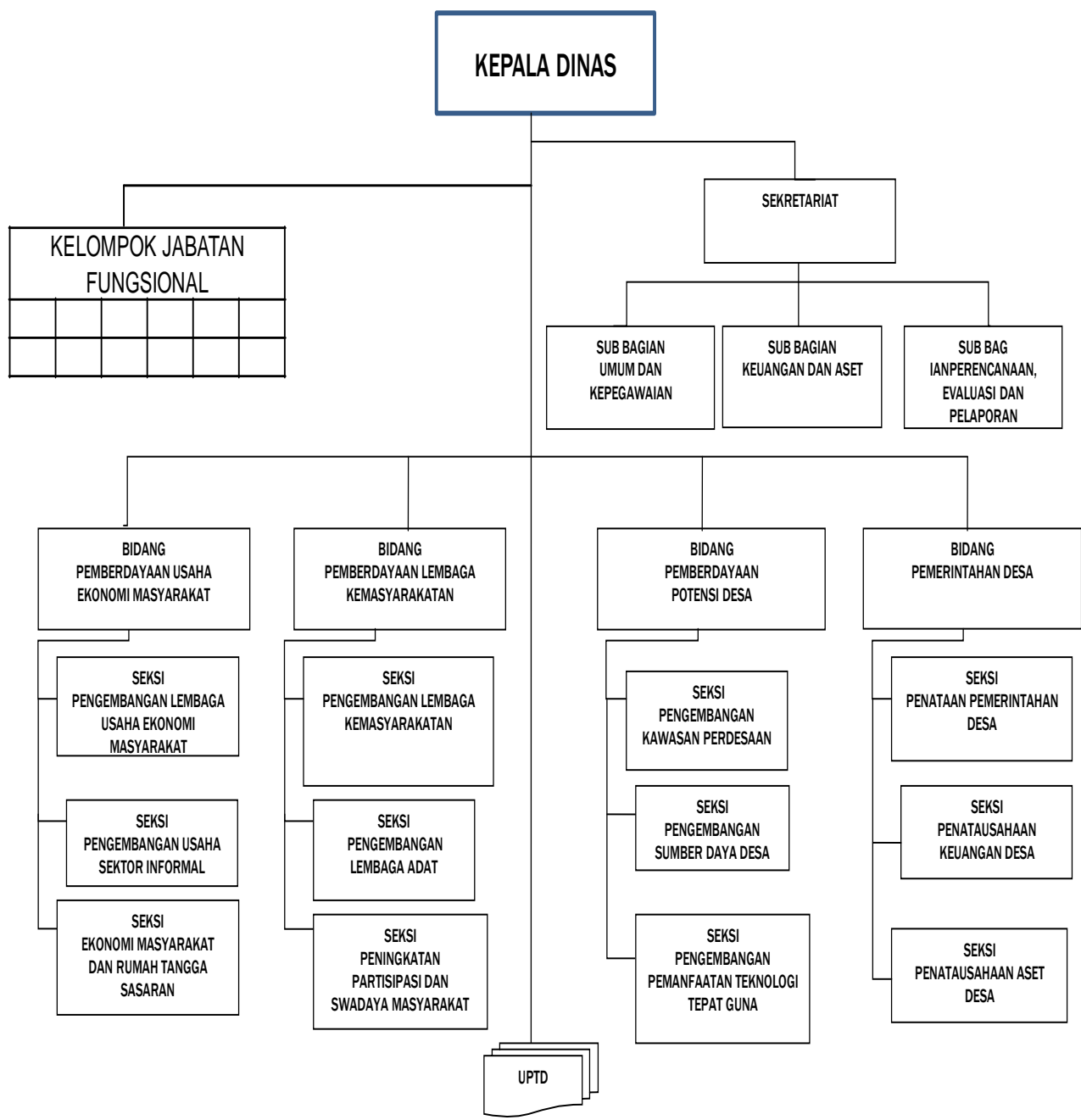
- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bidang-bidang meliputi :

- a) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - Seksi Pengembangan Usaha Sektor Informal;
 - Seksi Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran.
- b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 - Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Seksi Pengembangan Lembaga Adat;
 - Seksi Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
- c) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Desa;
 - Seksi Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- d) Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - Seksi Penataan Pemerintahan Desa;
 - Seksi Penatausahaan Keuangan Desa;
 - Seksi Penatausahaan Aset Desa.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016



Sumber Data : DPMD 2018

Sumber Daya Aparatur Dinas

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang didukung dengan SDM Aparatur sebanyak 55 personil dengan tingkat pendidikan yang variatif. Komposisi pegawai sesuai dengan strata pendidikan formal, penjenjangan dan eselonisasi dapat dilihat dari rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan									Jml
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D/3	S1	S2	S3	
1.	Kadin	-	-	-	-	-	-		1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
4.	Kasi	-	-	-	1	-	1	7	3	-	12
5.	Kasubag	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
6.	Staf	-	-	4	2	-	2	4	1	-	13
7.	Kontrak	-	-	-	8	-	1	12	-	-	21
Total		-	-	4	11	-	4	26	10	-	55

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2018

Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang per 31 Desember 2018 sebanyak 55 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan SDM lulusan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 26 orang, D3 4 orang, SMK dan SLTA 15 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah cukup baik karena 72,72 % (40 orang) adalah lulusan Perguruan Tinggi (D3-S2).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Jabatan	Penjenjangan				Jml	Ket.
		Adum/ Adumla/ Diklatpim IV	Diklatpim III / Spama	Diklatpim II / Spamen	Diklatpim I / Spati		
1.	Kadin	-	-	1	-	1	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1	-
3.	Kabid	-	4	-	-	4	-
4.	Kasubag	3	-	-	-	3	-
5.	Kasubid	11	-	-	-	11	-
6.	Staf	-	-	-	-	-	-
Total		14	5	1	-	20	-

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2018

Dari tabel Sumber Daya Aparatur tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dari segi tingkat pendidikan namun demi kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.

Tabel 1.3
Eselonisasi

No.	Eselon	Pangkat						Jml	Ket.
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1.	II-b	-	-	-	-	-	1	1	-
2.	III-a	-	-	-	-	1	-	1	-
3.	III-b	-	-	-	3	1	-	4	-
4.	IV-a	-	2	12	1	-	-	15	-
Total		-	2	12	4	3	-	21	-

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II-b yang membawahi Sekretaris dengan Eselon III-a dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan Eselon III-b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IV-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi dengan Eselon IV-a.

2. Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada umumnya dilakukan dengan cara penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada di perdesaan, yaitu berupa pembinaan dan pemberian pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan, namun demikian secara kuantitas hanya dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dan sarana yang ada.

Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengingat luas wilayah Kabupaten Malang yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan jumlah penduduk yang sangat besar, terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tersedia pada Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Malang sangat terbatas dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus dicapai sehingga perencanaan atau target kinerja kegiatan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan capaian kinerja pada umumnya sangat baik karena sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> .	Persentase pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.	80%	80%	100%
2.	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa.	Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD/K) dalam Pembangunan.	20%	20%	100%
3.	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan PADes.	Persentase Keaktifan BUMDesa	5%	7,57%	151%
4.	Meningkatkan partisipasi Masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat.	33,33%	33,33%	100%
5.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan desa	Persentase partisipasi perempuan dalam Pembangunan.	26,90%	48,28%	179%

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2018

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan *Good and Clean Government*, yang diukur dari Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang memahami Tugas Pokok dan Fungsi dengan formula jumlah peserta pelatihan dengan nilai baik dibandingkan dengan jumlah peserta pelatihan. Sumber data yang dipakai adalah *pretest* dan *posttest*, sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pemeritahan Desa.

Sasaran strategis kedua adalah Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Desa yang diukur dengan Persentase peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dalam Pembangunan. Sumber data yang digunakan adalah laporan dari kegiatan Bimbingan Teknis LPMD/K, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran strategis ketiga adalah Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan PADes yang diukur dengan Persentase peningkatan pembentukan BUMDes. Sumber data yang digunakan adalah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Sasaran strategis keempat adalah Meningkatkan partisipasi Masyarakat Perdesaan yang diukur dengan persentase peningkatan Swadaya masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah Laporan swadaya masyarakat dari Kecamatan, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran strategis kelima adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa yang diukur dengan persentase desa yang mengakomodir peran perempuan dalam pembangunan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
 - 1. Maksud
 - 2. Tujuan
- C. GAMBARAN UMUM
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas PMD
 - 2. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Periode Renstra.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan solusi
 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra 2016 – 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Kinerja Tahun 2018
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam perencanaan strategis terdapat tujuan dan sasaran.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat Desa;
- c. Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga Ekonomi Desa;
- d. Peningkatan peran masyarakat desa dalam proses pembangunan;

Sasaran untuk mencapai tujuan adalah :

- a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan *Good and Clean Government*;
- b. Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan dalam Pembangunan Desa;
- c. Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan PADes;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan.

2. Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Melaksanakan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Kepala Desa serta diberikan bantuan peralatan kantor bagi desa;
- b. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, Bimtek bagi lembaga sosial dan kemasyarakatan desa;
- c. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan bagi lembaga Ekonomi Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi bagi masyarakat dan Kelompok Masyarakat;

- Program yang dilaksanakan untuk melaksanakan kebijakan adalah :
- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Program Pengembangan Potensi Desa.

B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatkan kapasitas aparaturn Pemerintahan Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> .	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%
2.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan swadaya masyarakat.	5%
3.	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa.	36%
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	38,64%

- Program dan Kegiatan yang mendukung antara lain :
- 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - a. Penataan Pemerintahan Desa;
 - b. Penatausahaan Keuangan Desa;
 - c. Penatausahaan Aset Desa.
 - 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 - a. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Pengembangan Lembaga Adat;
 - c. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
 - 3. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - a. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Pengembangan Usaha Sektor Informal;
 - c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran.
 - 4. Program Pengembangan Potensi Desa
 - a. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Desa;
 - c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat pemberdayaan masyarakat, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumberdatanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas indikator kinerja utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan atau kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Laporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. 85 keatas : Sangat Berhasil
2. $70 \leq x < 85$: Berhasil
3. $55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
4. $x < 55$: Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> .	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan swadaya masyarakat.	5%	10,51%	210,2%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa.	36%	36%	100%
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	38,64%	39,77%	103%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
			2018	2017
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	-
2.	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan PADes	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa	100%	100%
3.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat	210,2%	102%
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	103%	-

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	100%	100%	60%
2.	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan PADes	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa	36%	36%	60%
3.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat	5%	10,51%	60%
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	38,64%	39,77%	60%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati mengalami keberhasilan. Target jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan (Alokasi Dana Desa) 378 desa, realisasinya 378 desa, target capaiannya 100%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa berhasil memberikan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelola keuangan desa dan manajemen Pemerintahan Desa;
 - Adanya koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyampaian laporan keuangan desa.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyampaian laporan keuangan desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan Penatausahaan Keuangan Desa dan Kegiatan Penataan Pemerintahan Desa.

- b. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa mengalami keberhasilan. Target pembentukan BUMDesa Tahun 2018 sejumlah 12 BUMDesa, realisasinya 12 BUMDesa. Jumlah BUMDesa yang terbentuk hasil pendampingan mulai tahun 2016 s/d Tahun 2018 sejumlah 27 BUMDesa, target pembentukan BUMDesa s/d Tahun 2021 sejumlah 75 BUMDesa. Dengan demikian persentase kenaikan pembentukan BUMDesa s/d Tahun 2018 yang ditargetkan 36%, realisasinya 36 % (tingkat capaiannya 100%) Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
- Adanya sosialisasi dan workshop tentang peran pentingnya BUMDesa bagi perekonomian masyarakat Desa;
 - Adanya potensi lembaga ekonomi perdesaan untuk dijadikan BUMDesa;
 - Adanya SDM yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan sosialisasi dan worksop tentang peran pentingnya BUMDesa bagi perekonomian masyarakat Desa;
- Melaksanakan fasilitasi / pendampingan pendirian BUMDesa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.

- c. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat mengalami keberhasilan. Target kenaikan swadaya masyarakat Tahun 2018 sebesar 5% dari tahun sebelumnya atau sejumlah Rp. 95.944.106.200,- terealisasi sebesar Rp.100.976.232.650,- Realisasinya mencapai 10,51% (capaiannya 210,2%). Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
- Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
 - Adanya Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Malang yang bisa memotivasi desa untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - Pelaksanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - Workshop tentang Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;

- Bimbingan Teknis Pelaporan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk melestarikan semangat dan budaya Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- Workshop tentang Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
- Bimbingan Teknis Pelaporan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

- d. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengembangan potensi desa mengalami keberhasilan. Realisasi Kinerjanya sebesar 39,77% dari target yang ditetapkan sebesar 38,64%, atau realisasi kinerjanya mencapai 103%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- Pemberian peralatan Teknologi Tepat Guna kepada kelompok masyarakat;
- Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa dari 6 desa yang ditargetkan realisasinya mencapai 7 desa yang mengikuti Pelatihan karena adanya tambahan 1 desa dapat diikuti pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi desa sesuai hasil identifikasi.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan pemberian peralatan Teknologi Tepat Guna kepada kelompok masyarakat;
- Melaksanakan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Potensi Desa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Desa dan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	1.110.783.000	39,77
2.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan swadaya masyarakat.	566.252.500	20,27
3.	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa.	561.304.000	20,10
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	554.860.000	19,86

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	100%	100%	100%	1.110.783.000	1.026.546.48	92,42
Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan swadaya masyarakat.	5%	10,51%	210,2%	566.252.500	564.052.500	99,61
Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa.	36%	36%	100%	561.304.000	557.154.000	99,26
Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	38,84%	39,77%	103%	554.860.000	545.736.048	98,36

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	100%	92,42	0,99%
2	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan swadaya masyarakat.	210.2%	99,61	0,99%
3	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa.	100%	99,26	0,99%
4	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	103%	98,36	0,99%

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Penataan Pemerintahan Desa.	Jumlah desa Pelatihan aparatur pemerintahan desa.	378 Desa	187,988,500
		Jumlah Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	43,355,000
		Jumlah Desa yang dievaluasi dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Malang.	4 desa	111,455,500
		Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	41 desa	335,310,245

Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5
	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumah desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	378 desa	289,867,499
	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah Inventarisasi Data Aset Desa.	378 desa	58,569,304
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimtek LPMD/K	26 desa	175,000,000
	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi Lembaga adat dan Pembinaan Lembaga Adat.	33 Kec.	180,587,500
	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya Masyarakat dari Kecamatan dan jumlah desa penilaian pelaksanaan GR terbaik.	33 Kec., 6 desa	173,643,000
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk melalui fasilitasi/pendampingan.	12 Desa	189,000,000
	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah desa Pelatihan Menjahit, Sablon dan Pengemasan produk (Pacaging).	4 desa	122,850,000
		Jumlah desa sosialisasi program Jalin Matra	84 desa	75,000,000
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah desa Pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS.	36 desa	170,304,000
Program Pengembangan Potensi Desa.	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa Identifikasi dan sosialisasi pengembangan kawasan pedesaan.	16 desa	173,643,000
	Pengembangan Sumber Daya Desa.	Jumlah desa Pelatihan Sumber Daya Desa.	7 desa	165,000,000
	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).	Jumlah alat TTG pada Gelar TTG Nasional dan Pemberian bantuan peralatan TTG.	2 unit alat TTG untuk Gelar TTG dan 12 Paket alat TTG untuk bantuan ke desa.	207,093,048
Jumlah				2,693,488,596

C. Prestasi Tahun 2018

Prestasi yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah :

1. Piagam Penghargaan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018;
Diraih oleh Desa Ngroto Kec. Pujon.
2. Piagam Penghargaan Juara I Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
Diraih oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kerto Raharjo Desa Sanankerto Kec. Turen.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, dengan harapan di tahun mendatang tujuan pelaporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Malang, Pebruari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MALANG

Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 198602 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra Tahun 2016 - 2021 <i>lampiran 1</i>
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018 <i>lampiran 2</i>
- Rencana Kinerja Tahun 2018 <i>lampiran 3</i>
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018 <i>lampiran 4</i>